

PENDAHULUAN

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata “power” yang berarti kekuasaan, karena ide pokok pemberdayaan berhubungan dengan konsep kekuasaan (Irmawati, 2019). Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan kemampuan (daya) masyarakat sehingga masyarakat memiliki kekuatan untuk maju dan berkembang (legal power), memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan (legal authority), serta dapat mengakses berbagai layanan publik (legal access) (Dadang Mashur et al, 2020). Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan perlindungan kepada masyarakat, dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan (Devia Hetty Hernany et al, 2023).

Menurut Rifka Putri Islamiati (2021), pemberdayaan masyarakat merupakan usaha meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang ada disekitarnya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sehingga dapat terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Ahmad Mustanir et al, 2023). Pemberdayaan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, memelihara tatanan nilai budaya setempat, serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat (Moh Miski, 2022). Dengan adanya pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih positif, seperti yang telah dicita-citakan bangsa yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, maju dan sejahtera (Theresa Oktari Wurara et al, 2021).

Pemberdayaan masyarakat merupakan kekuatan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi fisik, material, ekonomi, dan pendapatan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dapat menciptakan kemandirian sehingga masyarakat mampu berbuat, memahami, serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan (Asep Bambang Iryana, 2018). Pemberdayaan dalam upaya pembangunan berbasis pada masyarakat (people centred development), Karena

sasaran utama pemberdayaan yaitu masyarakat yang lemah tidak berdaya atau tidak berkekuatan untuk mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan (Firna Dianti et al, 2019). Pemberdayaan masyarakat sangat beragam seperti dalam bidang perikanan, pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan lain-lain (Dandy Wahyu Fathmadi, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bagian ke tiga paragraf 1 Pasal 126 tentang pemberdayaan masyarakat yakni: Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUMDesa, badan kerja sama antar-desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Pemberdayaan Masyarakat khususnya bagi masyarakat desa sangat perlu dilakukan, hal ini dikarenakan meningkat atau menurunnya kesejahteraan masyarakat sangat di tentukan dari kemampuan masyarakat itu sendiri (Nena Nurhasanah, 2017).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yaitu melalui program Smart Fisheries Village (SFV). Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan pintar merupakan program unggulan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan menjadi program kerja dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Annisa Khairani Aras et al, 2024). Program ini termasuk program baru karena pada tahun 2022 Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) baru menciptakan program Smart Fisheries Village (SFV) yang

merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Konsep Smart Fisheries Village (SFV) juga digunakan untuk sarana pengembangan sumberdaya manusia mulai dari aspek pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta sebagai sarana pengembangan usaha di bidang perikanan (<https://www.rri.co.id>).

Pengembangan program Smart Fisheries Village (SFV) desa tidak hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berperan, tetapi perangkat desa, masyarakat, pemerintah daerah, penyuluh perikanan, civitas akademika serta stakeholders yang lainnya juga turut berperan didalamnya. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BRSDM Nomor 156 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Desa Perikanan Cerdas/ Smart Fisheries Village BRSDM Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) menetapkan 10 lokasi Smart Fisheries Village berbasis pedesaan. Sepuluh lokasi Smart Fisheries Village (SFV) berbasis desa tersebut diantaranya adalah :

Table 1. Smart Fisheries Village (SFV) di Indonesia

No.	Desa	Potensi Utama
1)	Desa Linau, Maje, Kota Kaur, Bengkulu	Gurita
2)	Desa Mangunegara, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah	Ikan Nila
3)	Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan	Udang dan Bandeng
4)	Desa Poka, Teluk Ambon, Maluku	Ikan Kuwe
5)	Desa Nagari Ranah Koto Tinggi, Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Sumatera Barat	Usaha Wisata Bahari
6)	Desa Sumberdodol, Panekan, Kab. Magetan, Jawa Timur	Ikan Koi
7)	Desa Panembangan, Cilogok, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	Mina Padi

8)	Desa Kendalbulur, Boyolangu, Kab. Tulungagung, Jawa Timur	Ikan Patin
9)	Desa Sungai Dua, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Ikan Patin
10.	Desa Kawali, Kab. Ciamis, Jawa Barat	Ikan Nila dan Nilem

Sumber : <https://www.kkp.go.id>, 2023

Dari data tabel diatas diketahui bahwa Smart Fisheries Village (SFV) berbasis pedesaan memiliki potensi utama yang berbeda-beda di setiap desanya. Seperti di Desa Linau, Kec. Maje, Kota Kaur, Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi utama Gurita. Desa Mangunegara, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan potensi utama Ikan Nila. Desa Ajakkang, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi utama Udang dan Bandeng. Desa Poka, Teluk Ambon, Provinsi Maluku dengan potensi utama Ikan Kuwe. Desa Nagari Ranah Koto Tinggi, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan potensi utama Usaha Wisata Bahari. Desa Sumberdodol, Kec. Panekan, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur dengan potensi utama Ikan Koi, Desa Panembangan, kec. Cilongok, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan potensi utama mina padi. Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, Provinsi Jawa Timur dengan potensi utama Ikan Patin. Desa Sungai Dua, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan potensi utama Ikan Patin. Desa Kawali, Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat dengan potensi utama Ikan Nila dan Nilem. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan lokasi, iklim dan kondisi yang berbeda sehingga potensi yang dimiliki juga akan berbeda.

Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas adalah desa pertama yang dijadikan sebagai lokasi pilot project program Smart Fisheries Village (SFV) berbasis desa (<https://www.kkp.go.id>). Lokasi desa yang berada dibawah kaki gunung slamet membuat Desa Panembangan memiliki sumber air melimpah yang berasal dari sungai prukut yang digunakan sebagai irigasi sawah oleh petani. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh Desa Panembangan untuk kegiatan perikanan khususnya budidaya ikan air tawar. Oleh karena itu, Desa Panembangan terpilih untuk menjalankan Program Smart Fisheries Village (SFV)

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program Smart Fisheries Village (SFV) di Desa Panembangan dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat melalui Program Smart Fisheries Village (SFV) Desa Panembangan menghasilkan komoditas utama yaitu mina padi yang memiliki luas yaitu 25 hektare. Budidaya mina padi dilakukan di Desa Panembangan karena di desa ini memiliki sektor penggerak ekonomi disektor pertanian dengan mayoritas penduduknya adalah petani padi. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya maka dilakukanlah budidaya mina padi di Desa Panembangan.

Mina padi berasal dari kata dasar "mina" yang berarti ikan dan padi (Sekhar Chandra Pawana, 2022). Jadi, mina padi adalah penggabungan antara budidaya ikan dan tanaman padi di satu tempat yang sama yaitu sawah. Pada prosesnya, budidaya mina padi dilakukan dengan cara menanam padi seperti pada umumnya, bedanya hanya ditambahkan ikan dan pinggiran sawah dibuat caren atau kolam kecil untuk tempat berkumpulnya ikan, sehingga lahan sawah untuk menanam padi berkurang 10% - 20%. Budidaya mina padi memberikan manfaat yang banyak seperti mengoptimalkan lahan pertanian, mengefisienkan biaya produksi melalui penggunaan pupuk pestisida organik dari kotoran ikan, serta sebagai upaya peningkatan pendapatan petani dan pelestarian pertanian berkelanjutan (Luh Putu Kirana Pratiwi dan Made Budiasa, 2021).

Program pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) Desa Panembangan berfokus pada pengembangan perikanan dari hulu ke hilir yang dikolaborasikan dengan pariwisata. Kegiatan tersebut dilakukan oleh 14 kelompok yang terdiri dari 5 kelompok budidaya ikan (Pokdakan) mina padi, 3 kelompok budidaya ikan (Pokdakan) pembenihan ikan, 1 kelompok budidaya ikan (Pokdakan) pembesaran, 1 kelompok budidaya ikan (Pokdakan) Ikan Hias, 4 kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) dan 1 kelompok pakan mandiri. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui hadirnya koperasi perikanan, pasar ikan dan pariwisata yang diberi nama svarga mina padi panembangan. Wisata ini merupakan wisata edukasi perikanan sistem budidaya mina padi, sekaligus sebagai lokasi pelaksanaan program Smart Fisheries Village (SFV) budidaya ikan sistem mina padi Desa

Panembangan. Wisata svarga mina padi panembangan ini dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis). Di svarga mina padi panembangan, pengunjung dapat belajar tentang budidaya mina padi, istirahat sambil menikmati pemandangan di saung yang ada di sepanjang jalan lokasi wisata, dan juga dapat membeli makanan dan minuman yang dijual oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di lokasi wisata, bahkan produk olahan milik kelompok pengolah pemasar (poklahsar) ikan Desa Panembangan juga tersedia. Setiap kelompok dalam program pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) memiliki perannya masing-masing. Pada saat program berjalan, kelompok-kelompok perikanan ini mendapatkan bantuan dari berbagai stakeholders sesuai dengan bidangnya. Untuk mengetahui lebih dalam, maka perlu dilakukan penelitian tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui Program pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.

